

Peranan Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Sri Hardianty

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah dan Keguruan,
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

e-mail: srihardianty@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar sangat penting dan strategis. Perpustakaan memiliki peran besar dalam menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen, dan memfasilitasi akses informasi yang akurat dan up-to-date. Selain itu, perpustakaan juga dapat melaksanakan kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus. Perpustakaan dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar dan penelitian, sehingga membantu memaksimalkan hasil belajar mahasiswa. Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, juga harus tersedianya pustakawan yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan penelusuran informasi agar dapat membantu terpenuhinya kebutuhan informasi pemustaka. Perpustakaan perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukatif yang mengasah soft skill mahasiswa, seperti workshop, seminar, diskusi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kompetensi informasi mahasiswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran perpustakaan perguruan tinggi sangat krusial dalam menunjang implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi mahasiswa.

Kata kunci: *Perpustakaan Perguruan Tinggi, Kurikulum Merdeka Belajar*

Abstract

The role of the academic library in supporting the implementation of the Independent Learning Curriculum is very important and strategic. Libraries have a major role in providing reading materials according to the needs of students and lecturers, and facilitating access to accurate and up-to-date information. In addition, the library can also carry out cooperation with both internal and external campus parties. Libraries can provide adequate space and facilities for teaching and learning activities and research, so as to help maximize student learning outcomes. In supporting the implementation of the Independent Learning Curriculum, librarians who are competent in providing information retrieval services must also be available so that they can help fulfill the information needs of users. The academic library can also organize educational activities that hone student soft skills, such as workshops, seminars, discussions, and so on that aim to improve student information literacy and competence. Thus, it can be concluded that the role of the academic library is crucial in supporting the implementation of the Independent Learning Curriculum and helping to create a conducive and effective learning environment for students.

Keywords : *Academic Library, Independent Learning Curriculum*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang disepakati oleh seluruh individu sebagai elemen penting dalam sebuah negara. Kualitas pendidikan sebuah negara sangat menentukan

kemajuan negara tersebut. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa: "Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang sudah berupaya memberikan kepedulian terhadap perwujudan pendidikan yang baik. Berbagai upaya telah dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD dan APBN". Namun, kendatipun demikian pendidikan tidak terlepas dari berbagai persoalan. Survei yang dilaksanakan oleh *World Population Review* tahun 2021 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-54 dari 78 negara dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Indonesia masih berada di bawah negara serumpun dalam ASEAN yaitu Singapura yang berada pada posisi 21, Malaysia pada posisi 38 dan Thailand pada posisi 48 (Sambo, 2022). Artinya, Indonesia menjadi negara yang kualitas pendidikannya masih tergolong rendah.

Sementara itu, dunia pada abad ke 21 saat ini yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut peserta didik baik siswa maupun mahasiswa sebagai generasi bangsa untuk adaptif terhadap perubahan zaman dan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu agar mampu dan siap bersaing dalam dunia kerja. Kompetensi tersebut seperti kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kolaborasi, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan kreativitas dan inovasi (Kurniawati, 2019). Berdasarkan tuntutan di atas, maka diperlukan kurikulum pendidikan yang dapat mengakomodasinya.

Untuk itu, saat ini Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini dicetuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2020. Merdeka belajar merupakan sebuah terobosan baru sebagai keterbukaan proses pembelajaran yang nantinya dapat memberikan pengalaman belajar tanpa harus dituntut oleh standar ketuntasan dan standar kelulusan (Tiwikrama & Afad, 2021). Program merdeka belajar ini sejalan dengan aliran pendidikan progresivisme, dimana aliran ini menentang corak pendidikan otoriter yang terjadi di masa lalu (Mustaghfiroh, 2020). Merdeka belajar memberikan konsep bahwa memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020:1).

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka belajar dapat dipastikan harus memiliki perpustakaan untuk memberikan fasilitas sarana pembelajaran kepada sivitas akademika. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 55 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menyelenggarakan perguruan tinggi adalah harus memiliki perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diperlukan oleh setiap perguruan tinggi untuk membantu mencapai visi misinya sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat, dan melayani sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya (Suharso, dkk., 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama perpustakaan perguruan tinggi adalah menunjang pemenuhan kebutuhan informasi sivitas akademikanya serta menjadi pusat sumber belajar.

Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya maka perpustakaan perguruan tinggi harus memenuhi fungsi

pendidikan, penelitian, informasi, rekreasi dan pelestarian. Saat ini, perpustakaan perguruan tinggi mulai melebarkan jangkauan pelayanannya, tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi tersebut akan tetapi juga masyarakat umum dan sivitas akademika dari perguruan tinggi lainnya. Hal inilah yang mendorong perpustakaan memiliki hubungan dalam implementasi kurikulum merdeka belajar.

Kurikulum merdeka belajar ini tentunya menimbulkan tantangan yang besar dalam implementasinya pada sistem pendidikan. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan, perpustakaan perguruan tinggi harus mengambil bagian untuk ikut andil dalam mendukung terselenggaranya kurikulum merdeka belajar. Perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi, memiliki peran sentral dalam terwujudnya kurikulum ini. Untuk itu artikel ini akan menjelaskan peran yang dapat dilakukan perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung implemementasi kurikulum merdeka belajar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif. Penelitian kepustakaan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan membaca dan mencatat hasil dari pengumpulan data pustaka serta diolah untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Penggunaan pendekatan secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara detail dan jelas hasil penelitian untuk mendukung serta meningkatkan pemahaman pembaca terhadap kajian penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memahami dan menganalisis sumber data yang berasal dari sumber referensi ilmiah yang sesuai dengan fokus penelitian.

Tahapan yang dilakukan selama studi pustaka, yaitu: pertama, memilih topik yang akan dikaji. Kedua, mencari data dan menyeleksi artikel-artikel hasil penelitian yang sesuai dengan topik kajian. Ketiga, melakukan analisis dan mensintesis sumber-sumber ilmiah yang ditemukan sesuai dengan topik kajian. Keempat, mengorganisasikan tulisan dengan cara mengembangkannya sesuai topik, lalu menyimpulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu pendekatan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi agar paradigma pendidikan menjadi lebih otonom dengan budaya belajar yang inovatif, fleksibel dan berkualitas. Saat ini, dinamika dan perubahan yang dialami dunia pendidikan begitu dinamis. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan tuntutan dunia terhadap kompetensi individu pada abad ini menstimulasi mahasiswa untuk siap dan mampu bersaing di dunia global. Oleh sebab itu, dalam kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi mahasiswa didorong untuk menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan keinginan dan keahliannya. Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa untuk memilih sendiri mata kuliah yang mereka akan ambil sesuai dengan preferensinya masing-masing.

Landasan hukum kurikulum ini adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Salah satu isi dari kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar ini adalah hak belajar selama 3 semester di luar program studi yang dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020:5).

Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menyusun rencana strategis. Ini bertujuan membekali alumni perguruan tinggi yang bermutu untuk dapat memenuhi tuntutan

kebutuhan dunia. Pelaksanaan merdeka belajar ini berhubungan dengan Tri Dharma perguruan tinggi dan aspek tata kelolanya. Kampus merdeka yang diprakarsai oleh Mendikbud ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Apalagi di zaman yang semakin kompetitif dan disruptif saat ini. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Prahani, dkk., (2020) tujuannya adalah mendukung sivitas akademika dalam program pembelajaran yang lebih berkualitas dan lebih memiliki makna yang mendalam.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka tentunya terdapat beberapa konsekuensi bagi perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan ini berjalan adaptif. Diperlukannya kebijakan administrasi, kerja sama antar prodi, unit, perguruan tinggi, dunia usaha/industri sampai antar negara. Selain dari hal tersebut, karena proses pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar yang amat esensial adalah perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), penting juga dipersiapkan dan tersedianya sumber pembelajaran yang mendukung kurikulum ini. Intinya, setiap unit kerja dalam perguruan tinggi termasuk perpustakaan harus melaksanakan perannya secara maksimal agar kurikulum ini dapat terimplementasikan dengan efektif.

Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 dinyatakan bahwa perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Tujuan dari penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai sumber belajar sivitas akademika dalam pencapaian tujuan pembelajaran, sumber informasi yang mudah diakses oleh pemustaka, juga sebagai tempat mendapatkan sumber primer dan sekunder untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengkajian ilmu pengetahuan (Reyhan & Hermintoyo, 2019).

Berdasarkan tugas dan fungsi perpustakaan tersebut, maka eksistensi perpustakaan perguruan tinggi sangat strategis untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Perpustakaan perguruan tinggi dapat berperan dalam hal sebagai berikut:

a. Menambah Kuantitas dan Variasi Bahan Pustaka

Perpustakaan dan bahan pustaka di dalamnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai unit penyedia bahan pustaka menjadi tulang punggung berkembangnya ilmu pengetahuan sivitas akademika kampus. Bahan pustaka adalah semua hal yang mengandung informasi yang disimpan-sajikan oleh perpustakaan (Suwarno, 2017:38). Seiring berkembangnya teknologi informasi yang merambah ke segala aspek/bidang termasuk perpustakaan, maka bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan juga berkembang menjadi tidak hanya dalam bentuk tercetak saja, melainkan juga dalam bentuk bahan pustaka elektronik.

Bahan pustaka tercetak merupakan jenis terbitan yang dicetak, dapat dibaca dan dipegang langsung oleh pemustaka. Sedangkan bahan pustaka elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-resource* adalah jenis terbitan yang membutuhkan akses komputer atau media lainnya dalam memanfaatkannya. *E-resource* dapat terdiri dari *e-book*, *e-journal*, *e-repository*, *e-newspaper*, *e-magazine*, *e-proceeding* dan lain sebagainya (Rodin, 2017). Bahan pustaka elektronik ada pula yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi *e-library* (perpustakaan digital). Bahan pustaka elektronik tersebut perlu dimiliki oleh perpustakaan perguruan tinggi sebab mempunyai kelebihan untuk dapat dimanfaatkan kapan saja dan dimana saja. Hal tersebut juga menutupi kekurangan pelayanan perpustakaan konvensional yang terbatas waktu. Intinya untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar yang mengharuskan proses pembelajaran berjalan dinamis, fleksibel, kreatif dan interaktif, maka perpustakaan perguruan tinggi harus menambah kuantitas dan keberagaman subjek bahan pustaka yang dikoleksinya baik tercetak maupun elektronik. Hal tersebut untuk dapat memenuhi semua kebutuhan informasi seluruh pemustaka atau sivitas akademika kampus dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi.

b. Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi

Setiap kebijakan baru tentu saja mempunyai tantangannya tersendiri. Untuk itu, dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, diperlukan kerja sama tim yang kuat dari seluruh sivitas akademik kampus antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan termasuk dalam hal ini pustakawan dan juga dengan perpustakaan dari universitas lain. Fadhila, dkk., (2023) mengatakan bahwa perpustakaan tidak dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya dapat memenuhi kebutuhan informasi penggunanya, jika tidak bekerjasama dengan perpustakaan lain. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antar perpustakaan sebab kolaborasi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya kesepakatan untuk berbagi database koleksi dan melaksanakan silan layan. Kerjasama antar perpustakaan dapat juga dilaksanakan di bawah dukungan organisasi perpustakaan perguruan tinggi misalnya FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia) atau APPTIS (Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam) untuk PTKIN. Dalam melaksanakan kerjasama baik dengan pihak internal dan eksternal kampus, diharapkan setiap pihak yang terlibat dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Dengan demikian diperlukan komitmen dan kerelaan semua pihak untuk bekerjasama demi terwujudnya Kurikulum Merdeka Belajar yang paripurna.

c. Meningkatkan Kompetensi Pustakawan Perguruan Tinggi

Pustakawan merupakan sumber daya manusia yang membantu penyelenggaraan perpustakaan melalui pemberian pelayanan informasi bagi pemustakanya. Pelayanan perpustakaan yang memuaskan bagi pemustaka terjadi apabila pustakawan memiliki kompetensi yang mumpuni.

Mathar, dkk., (2021) menjelaskan bahwa untuk membantu pemustaka, pustakawan harus memiliki keterampilan dalam mencari informasi, seperti mampu melakukan pencarian secara optimal melalui media online untuk membantu pemustaka dalam memberikan informasi bahan bacaan. Pustakawan harus dapat mencari informasi melalui *search engine* dengan cepat dan akurat. Tidak hanya itu, pustakawan juga harus mampu mengidentifikasi dan menelusuri informasi yang tersedia di berbagai *database online*. *Database* semacam itu biasanya menyediakan koleksi yang cukup lengkap dan beragam, misalnya seperti *database* yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional RI dan *database* perpustakaan lainnya yang menyediakan berbagai koleksi seperti artikel jurnal, buku, lainnya. Seorang pustakawan harus memiliki kemampuan layaknya tenaga pengajar yang mampu berinteraksi lebih aktif dengan penggunanya. Di kampus, mereka bisa menjadi mitra terbaik bagi seluruh sivitas akademik. Dengan kata lain pustakawan harus mampu menjadi konsultan literasi.

d. Menyediakan Sarana Prasarana Pendukung

Untuk dapat menggali potensi dari mahasiswa dan dosen serta terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, perpustakaan perguruan tinggi dalam perannya untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dapat menyediakan sarana dan prasarana pendukung di perpustakaan. Fatmawati (2020) mengatakan bahwa perpustakaan perguruan tinggi dapat lebih proaktif memberikan media bagi mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi di ruang-ruang perpustakaan. Tujuannya adalah agar terbuka daya kreasi dan menumbuhkan inovasi mereka sehingga akan memunculkan ruang produktif yang lebih kaya dengan ide dan gagasan baru. Mathar, dkk., (2021) menambahkan bahwa dalam rangka mendukung pembelajaran aktif, perpustakaan perguruan tinggi diharapkan mampu menghadirkan atau menyediakan media/fasilitas yang dapat mendukung pembelajaran sehingga mahasiswa dapat merasa nyaman dalam belajar.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perpustakaan harus menawarkan lingkungan belajar yang ideal bagi mahasiswa dan dosen untuk mewujudkan potensi

akademik mereka dengan menyediakan fasilitas seperti ruang baca, ruang diskusi, tempat kerja, dan ruang belajar lainnya yang dapat digunakan baik secara mandiri maupun bersama-sama.

e. Mengadakan Kegiatan Edukatif

Dalam rangka melahirkan mahasiswa yang mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, perguruan tinggi harus menyiapkan kompetensi mahasiswa untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan zaman. Untuk itu, perpustakaan perguruan tinggi dituntut dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa mencapai pembelajaran dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan optimal. Fatmawati (2020) menyatakan bahwa disinilah perpustakaan bisa lebih aktif berperan mengadakan *event* yang bernuansa *soft skill*, seperti acara pelatihan dan pembekalan dengan topik yang relevan maupun kelas diskusi literasi tingkat dasar sampai dengan *advanced*. Selain itu, juga kegiatan *public speaking*, Bahasa Inggris, *personal branding*, komunikasi efektif, kepribadian, teknik negosiasi, dan lain sebagainya. Semua kegiatan seperti ini sangat mungkin untuk diadakan sebagai program perpustakaan secara berkala dan berkelanjutan. Perpustakaan perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukatif lainnya, seperti workshop, seminar, diskusi, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kompetensi informasi mahasiswa.

Dari paparan di atas maka dapat diketahui bahwa ada beberapa peran yang dapat dilaksanakan oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Dalam hal ini, perpustakaan sebagai bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan harus memiliki strategi jangka panjang untuk mengembangkan literasi sivitas akademika dan menyediakan berbagai sumber informasi baik tercetak maupun elektronik.

Selanjutnya yang diharapkan adalah terjalinnya kemitraan yang kuat antara perguruan tinggi dengan perpustakaan sehingga menghasilkan kreativitas dan inovasi kemandirian dalam belajar pada diri mahasiswa. Kemampuan literasi sangat berkorelasi dengan tingkat literasi. Semakin baik kemampuan literasi seseorang maka akan semakin menjadikannya pembelajar yang literat dalam memecahkan permasalahan secara mandiri. Oleh karena itu pada hakikatnya perpustakaan sebagai bagian dari proses pembelajaran harus menjadi tonggak literasi di perguruan tinggi.

Kemudian, untuk melayani para pemustaka dalam hal ini sivitas akademika kampus, salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berkompeten dibidangnya. Pustakawan yang berkompeten akan mampu memberikan pelayanan informasi yang berkualitas guna mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Yudhawasthi & Christiani (2021) mengatakan bahwa kondisi perpustakaan yang beragam dapat menjadi tantangan tersendiri dalam hal ini. Untuk itu diperlukannya dukungan dari pimpinan masing-masing universitas dan kemampuan dari pustakawan agar dapat meyakinkan pimpinan akan pentingnya peran perpustakaan dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan terlaksananya Tri Dharma perguruan tinggi.

SIMPULAN

Kurikulum merdeka belajar merupakan program pemerintah yang dikeluarkan guna memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Agar kurikulum ini berjalan efektif maka dibutuhkan peranan dari perpustakaan melalui: pertama, menyediakan akses informasi yang relevan dan akurat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedua, mengembangkan kolaborasi dengan unit-unit lain dari dalam dan luar perguruan tinggi. Ketiga, meningkatkan kompetensi pustakawan. Keempat, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Dan kelima, melaksanakan kegiatan edukatif. Perpustakaan dapat melaksanakan program atau kegiatan yang mengasah *soft skill* mahasiswa agar memiliki kompetensi tambahan yang dibutuhkan saat ini di luar pengetahuan atau kompetensi *hard skill* yang didapatkan dalam perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Fadhila, P., Firdaus, M., Tarigan, T., & Yusniah. (2023). Jaringan Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Dawatuna: Jurnal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(2), 289-297.
- Fatmawati, E. (2020). Dukungan Perpustakaan Dalam Implementasi “Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar.” *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1076–1087.
- Kurniawati, I. (2019). *Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah untuk Mempersiapkan Generasi Unggul Menghadapi Tantangan abad 21*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pasca Sarjana, Universitas Negeri Semarang.
- Mathar, T., Hijrana, H., Haruddin, H., Akbar, A. K., Irawati, I., & Satriani, S. (2021). *The Role of UIN Alauddin Makassar Library in Supporting MBKM Program*. Makalah dipresentasikan pada International Conference on Social and Islamic Studies (SIS).
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 1-10.
- Prahani, B., Deta, U., Yasir, M., Astutik, S., Pandiangan, P., Mahtari, S., & Mubarak, H. (2020). The Concept of “Kampus Merdeka” in Accordance with Freire’s Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education*. 1(1). 21-37.
- Reyhan, M., & Hermintoyo. (2019). Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Layanan Repository Perpustakaan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Universitas Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(3), 204-216.
- Rodin, R. (2017). Peran Strategis E-Resources Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Menunjang Akreditasi program Studi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 1(2), 103-117.
- Sambo, Masriadi. (2022). *Membenahi Kualitas Pendidikan Kita*. Jakarta: Media Indonesia.
- Suharso, P., Arifiyana, IP., & Wasdiana, MD. (2020). Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Annuva*, 4 (2), 271-286.
- Tiwikrama, S., Afad, M., & Hakim, M. (2021). Merdeka Belajar Dari Rumah: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lokalitas Dimasa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1). 34-46.
- Yudhawasthi, C. M., & Christiani, L. (2021). Challenges of higher educational documentary institutions in supporting Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program. *Khazanah al Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Kearsipan*, 9(2), 193-209.